KONSTRUKSI *GENDER MAINSTREAMING* DI ERA MULTIKULTURALISME
(Ikhtiar Memperkuat Arah Gerakan Gender pada Ruang Publik Di Indonesia)

Oleh: Prof. Dr. Hj. Siti Muri'ah

Abstrak :

Gender discourse at Indonesian until current have position that progressively strong, both as scholarly study *(study issues),* and also movement. Gender's movement has cleared away until support practice level gender in public rooms *(public sphere).* But, dynamic of gender that happening on gender's movement reaps a lot of criticism while simultaneously with multiculturalism's movement. Gender's movement just create culture form dominates new, female internal conflict and can't secure justice yet for female in their groups. Necessary one wider movement model until public's level arrangement and State policy that right ala gets to secure gender's justice. To it, necessary construction paradigmatic new, for example movement paradigm support that gets orientation on accrued by right of determines thyself *(self determination),* admitting politics rights *(political recognition),* get approaching of down *(bottom up)* and secures female justice at level was contemned by it communal environment. Utilized up to the effect that at requires good implementation strategy internally and also external. Internally, necessary stage strengthens consciousness, strengthening solidity and strengthens functional gender's movement. Externally, necessary steps for example: creating access room, participation, control and benefit that gets gender's justice on sector public and State policy. With paradigmatic construction and that reach strategy, expected by gender mainstreaming get multiculturalism basis manifestly can materialize deep spatial public and State politics policy that give surety will gender's equivalence and justice widely.

Key Words: *Gender mainstreaming*, multikulturalisme, ruang publik, Indonesia.

A. Pendahuluan

Diskursus Gender sampai saat ini tetap menjadi topik menarik, bahkan gender mengalami *positioning* yang lebih kuat, bukan saja sebagai kajian keilmuan *(study issues)*, namun telah merambah hingga level praktik penguatan gender dalam ruang-ruang publik *(public issues).* Gender bukan lagi sebatas wacana dan topik-topik kajian, namun sudah sampai level pengembangkan perspektif dan gerakan untuk menjadi kultur bersama yang harus ditata ulang *(re-constitution)* pada ruang-ruang publik. Kajian Gender saat ini semisal bukan lagi menyoal tentang relasi antara agama dan perempuan, namun telah masuk pada bentuk-bentuk penguatan dalam konstruksi sosial bernegara. Demikian juga, lingkup studi gender juga semakin signifikan dan luas ketika dipersandingkan dengan topik lain, seperti multikulturalisme.

Sebagai sebuah kajian, gender memang bermula dari adanya fakta ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan yang bersifat hegemonik terhadap entitas inferior perempuan[1]. Problemnya kemudian berlanjut dengan massifnya perilaku sosial dengan berbagai alat legitimasi seperti doktrin-doktrin teologis, budaya, politik dan model-model lain yang merepresentasikan kontruksi gender tertentu yang jauh dari nilai persamaan *(equality)* sehingga membentuk sebuah konstruksi sosial. [2]. Dalam konstruksi sosial tertentu, kondisi ini menimbulkan dampak negatif yang semakin kuat ketika berada dalam ruang struktur masayarakat yang multikultur seperti Indonesia.

Ketika Ketimpangan gender telah menjadi konstruksi sosial, maka memunculkan pola perbedaan perlakuan antara laki-laki dengan perempuan dalam peran sehari- hari dan menjadi stereotipe tertentu di dalam masyarakat. Perempuan secara inferior dibingkai dalam fakta relasi dominatif, eksploitatif dan menjadi sasaran prilaku hegemonik.[3]

Pola sosial yang seperti ini akan mengakibatkan pada terbentuknya pola konstruksi kultural akan semakin sulit diubah. Apalagi jika pola seperti ini 'sengaja' dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dan bahkan dikonstruksi secara sosial atau cultural baik melalui ajaran keagamaan

---

[1] Tina Chanter, *Gender: Key Concepts in Philosophy*, (London: Continuum International Publishing Group, 2006), hlm. 9.

[2] Chris Beasley, *Gender & Sexuality: Critical Theories, Critical Thinkers*, (London: Sage Publications, 2005), hlm. 11.

[3] Fakta inilah yang memunculkan suatu bentuk pertanyaan dari Clane Chambers yaitu mengapa ketimpangan relasi gender terjadi sepanjang sejarah disamping persoalan penting atas perubahan sosial. Clane Chambers, *Sex, Culture, and Justice: The Limits of Choice*, (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2008), hlm. 46.

maupun kebijakan Negara.[4]. menurut Richard A. Lippa, situasi seperti ini dibahasakan dengan istilah *power relation.* [5]

Secara doktrinal, Islam melalui Alquran dan Sunnah sebenarnya secara tegas memandang laki-laki dan perempuan secara *equal (al Musawah),* sehingga eksistensi perempuan sesungguhnya merupakan kekuatan penyeimbang *(balancing power)* bagi laki-laki untuk melakukan kerjasama secara 'simbiosis-mutualistik' dalam penciptaan sistem kehidupan yang harmoni. Ziaul Haque dalam *Revelation and Revolution in Islam* pernah menjelaskan, ada tiga *reason* bagi diutusnya para nabi kepada manusia: *pertama,* untuk menyatakan kebenaran; *kedua,* untuk melawan kepalsuan *(bathil)* serta penindasan *(zulm)*; dan *ketiga,* untuk membangun komunitas atas dasar kesetaraan sosial, kebaikan, keadilan dan kasih sayang.[6] Dengan demikian, secara teknis dan sosial revolutif, kedatangan Islam memiliki tujuan untuk mengutamakan nilai-nilai persaudaraan yang universal *(universal brotherhood)*, kesetaraan *(equality)* dan keadilan social *(social justice).*[7]

Meski demikian, dalam praktiknya, ketidakadilan gender baik dalam ruang privat maupun ruang sosial/publik tetap menjadi fenomena yang masih tak terhindarkan. Dalam ruang sosial yang menjadi arena perebutan berbagai macam budaya (multikultur) dan perebutan aneka macam politik identitas, identitas perempuan menjadi salah satu pusaran perdebatan kunci. Namun ironisnya, perebutan identitas perempuan seringkali berakhir pada situasi yang tidak atau belum menguntungkan perempuan itu sendiri.

Penulis yakin, tentu ada sesuatu yang salah *(something wrong)* dari fenomena ini baik dikarenakan belum kuatnya pemahaman bersama *(world view)* soal keadilan gender maupun penguatan gender di ruang publik terlebih ditengah masyarakat yang multikultur. Padahal, masyarakat multikultural merupakan sebuah kondisi atau tatanan yang seharusnya berisi masyarakat yang bersedia menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Singkatnya, masyarakat multikultur adalah masyarakat yang memberikan penegasan bahwa dengan segala bentuk

---

[4] Jasmani, *Pendidikan Islam Egaliter: Membangun Pendidikan Feminim atas Superioritas Maskulinitas*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2011), hlm. 6.

[5] Lebih detailnya tentang kedua teori ini lihat dalam Richard A. Lippa, *Gender, Nature, and Nurture*, (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2002).

[6] Ziaul Haque, *Revelation and Revolution in Islam,* (New Delhi: International Islamic Publishers, 1992), hlm. 30.

[7] Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (terj.) Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 22.

perbedaannya, mereka adalah sama di dalam ruang publik.[8]

Berawal dari pemikiran itulah, diperlukan sebuah telaah kajian tentang pola-pola strategi pengarus-utamaan gender *(gender mainstreaming)* dalam tatanan masyarakat multikultur dengan fokus pada usaha memperkuat gerakan gender di sektor publik di Indonesia.

B. Studi Gender dalam Multikulturalisme

Studi gender memiliki fokus kajian tentang kesetaraan *(equality)* tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Namun ketika dipersandingkan dengan wacana multikulturalisme, maka sedikit memiliki fokus yang relatif berbeda. Jika multikulturalisme berfokus pada membela minoritas dalam kelompok, maka gender mainstreaming yang biasanya dilekatkan pada kaum feminisme membela minoritas gender, yakni perempuan.

Konsekuensinya, dalam konteks multikulturalisme yang seringkali berhubungan dengan identitas individu dalam kelompok, identitas perempuan yang menjadi *concern* studi gender mesti tidak dipahami sebagai identitas yang tunggal.[9] Kajian multikulturalisme akan memotret sekian banyak identitas perempuan-perempuan dalam kelompoknya masing-masing dan mesti dilihat sebagai fenomena yang berbeda-beda sesuai kondisi budayanya masing-masing. Hal ini berbeda dengan cara pandang dominan feminisme. Meski demikian, gender dalam multikulturalisme memiliki *core* semangat yang sama, yakni membela minoritas, dalam hal ini seringkali terjadi pada perempuan dalam ruang publik sosial.

Secara sederhana, multikulturalisme berarti "keberagaman budaya".[10] Terdapat tiga istilah yang kerap digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri keberagaman tersebut, baik keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda yaitu pluralitas *(plurality)*, keragaman *(diversity)*, dan multikultural *(multicultural)*. Ketiga ekspresi itu sesungguhnya tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu kepada adanya 'ketidak-tunggalan'.

Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multikultural. jika pluralitas *(plurality)* sekadar

---

[8] *Ibid*., hlm. 98.

[9] Dalam isu pologami misalnya yang seringkali menjadi isu relasi laki-laki dan perempuan, respon perempuan-perempuan sangat variatif. Terdapat perempuan yang secara tegas menolak dengan dasar ketidaksetaraan, sementara perempuan yang lain dapat menerimanya, dengan alas an keberimanannya.

[10] Andre A Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.), Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture (London: Sage Publication, 2002), hlm. 2-6.

merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), maka multikulturalisme menunjuk pada makna kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, Gender, bahasa, ataupun agama. Dengan demikian, multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik.

Dalam konteks ruang publik, multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara. Oleh karena itu, multikulturalisme sebagai sebuah gerakan menuntut pengakuan *(politics of recognition)* terhadap semua perbedaan sebagai entitas dalam masyarakat yang harus diterima, dihargai, dilindungi serta dijamin eksisitensinya.[11] multikulturalisme meniscayakan baik secara realitas maupun etika bagaimana keragaman semestinya dikelola dalam ruang publik.[12]

Dalam studi multikulturalisme, setidaknya terdapat 3 bentuk keragaman budaya yang paling umum dijumpai dalam masyarakat modern. Yakni, (1) keanekaragaman subkultur (*subcultural diversity*), (2) keanekaragaman perspektif (*perspectival diversity*) dan (3) keanekaragaman komunal (*communal diversity*).[13] *Pertama,* Keaneka-ragaman sub-budaya (*subcultural diversity*). Meskipun warga masyarakat sama-sama menganut dan meyakini sebuah kultur yang kurang lebih sama, namun mereka tidak menjalankan keyakinan dan praktik-praktiknya secara sama dalam sejumlah aspek kehidupan yang penting. Meskipun mungkin terlihat kurang lumrah, namun mereka merasa bahagia dalam menjalankan pola-pola budaya seturut pandangan mereka yang khas ini di dalam sebuah kultur yang dominan.

Kedua, Keanekaragaman perspektif (*perspectival diversity*). Sejumlah warga masyarakat teramat kritis dalam menyikapi atau menanggapi

---

[11] Jurnal multikulturalisme dalam pendidikan Islam, http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-II-06.pdf, hlm. 3.

[12] Tim Penyusun Martono dkk, *Hidup berbangsa dan Etika Multikultural* (Surabaya : Forum Rektor Simpul, 2003), hlm. 10.

[13] Professor Bhikhu Parekh (kelahiran 1935) adalah pengajar di Pusat Studi Pemerintahan Global di *London School of Economics* (LSE) dan profesor emeritus jurusan teori-teori politik di University of Hull (Inggris). *Rethinking Multiculturalism* (2000) serta *Gandhi* (2001). Baca juga selengkapnya dalam Hendar Putranto, *Jurnal Ultima Humaniora*, Maret 2013, hal 11-28. Bandingkan juga Bandingkan dengan pernyataan yang dibuat oleh Paul Kelly (2002). Editor. *Multiculturalism Reconsidered.* Oxford: Polity Press, hlm. 1. Menurutnya, *"all modern states face the problems of multiculturalism even if they are far from endorsing multiculturalism as a policy agenda or oicial ideology. They do so because they face the conlicting claims of groups of people who share identities and identity-conferring practices that difer from those of the majority in the states of which they are a p art."*

prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari budaya yang dominan dan mereka berupaya untuk menyusun kembali nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan tersebut agar menjadi lebih seimbang. Contohnya, kaum feminis yang mengkritik bias-bias patriarkal yang sudah mengurat akar dalam struktur dan budaya masyarakat di mana mereka hidup. Mereka mengembangkan perspektif yang khas tentang bagaimana kultur bersama itu harus ditata ulang dan 'disusun kembali' (*re-constitution*). sedangkan *Ketiga,* Keanekaragaman komunal (*communal diversity*) merupakan sejumlah komunitas yang sadar-diri, yang cukup rapi terorganisasi dan yang percaya sekaligus menghidupi kepercayaan itu lewat praktik-praktik tertentu secara berbeda-beda.

Selain bentuk keragaman tersebut, dalam studi multikulturalisme juga ada dua model kemungkinan untuk menanggapi kemajemukan budaya ini. *Pertama,* kemajemukan dipersilakan dan bahkan dirayakan.[14] Kemajemukan dianggap sentral untuk mengembangkan pemahaman diri baik individu maupun warga masyarakat. Kemajemukan dihormati, tidak hanya lewat tutur kata melainkan juga lewat hukum dan kebijakan yang sengaja dibuat untuk menjamin kemajemukan tersebut. *Kedua*, dengan mengembangkan kebijakan asimilasi, dimana kemajemukan budaya, dengan satu atau lain cara, diupayakan untuk dilebur (diasimilasi) ke dalam budaya yang dominan (*mainstream*), entah sebagian saja atau seluruhnya. Multikulturalitas dengan demikian mengacu pada fakta kemajemukan budaya (*cultural plurality*) sementara multikulturalisme adalah tanggapan atas fakta tersebut.

Dengan mempertimbangkan arah kajian tersebut, maka studi gender dalam multikulturalisme meski berarah pada telaah 1) bagaimana tempat dan peran perempuan dalam pembuatan kebijakan dan model yang menjamin multikulturalisme tanpa menimbulkan gesekan konflik sosial, 2) Apakah multikulturalisme yang dibangun mendukung dan memajukan isu kesetaraan Gender serta menghapuskan kekerasan dan penindasan terhadap perempuan sebagaimana diperjuangkan kaum feminis dan 3) bagaimana aplikasi dari multikulturalisme dan problematika teoretis-praktis di lapangan yang muncul sebagai konsekuensi dari penerapan multikulturalisme sebagai sebuah cara menata masyarakat yang semakin majemuk.

Selain pertanyaan-pertanyaan tersebut, studi gender di era multikulturalisme juga mesti diarahkan pada pencarian format model paradigm gerakan gender yang efektif dalam era multikulturalisme dengan konteks Indonesia. Dalam konteks kajian, hal ini penting dipikirkan, sebab

---

[14] Bdk. Watson, C. W. (2000).*M ulticulturalism.* Buckingham-Philadelphia: Open University Press, hlm. 3-4.

pada kenyataannya, seringkali gerakan gender dalam era multikulturalisme justru seringkali menimbulkan efek konflik sosial yang justru jauh dari nilai positif multikulturalisme itu sendiri. Juga demikian, apakah multikulturalisme yang dibangun mendukung dan memajukan isu kesetaraan Gender serta menghapuskan kekerasan dan penindasan terhadap perempuan itu sendiri.

C. Fenomena Gerakan Gender di Indonesia

Sejauh ini, gerakan gender *(gender movement)* di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Bermula dari sekedar memperkuat wacana kajian teoritis perspektif gender seperti penafsiran atas ayat-ayat teologi berperspektif gender, saat ini, telah memasuki gerakan-gerakan yang lebih bersifat praksis, seperti gerakan memperkuat gender dalam ruang kebijakan-kebijakan publik yang dibuat. Alhasil, gerakan gender pada masayarakat Indonesia yang multikultur mengalami dinamisasi yang cukup menarik. Gender[15] dalam perkembangannya yang seperti ini merupakan sesuatu yang wajar dan lumrah seiring dengan menguatnya kesadaran multikulturalisme.

Babak baru gerakan gender di Indonesia berkembang memasuki arena multikulturisme dari sekedar gerakan yang berisi penguatan wacana dan bengunan perspektif baru yang biasanya berisi kajian teks-teks agama. Babak baru ini di tandai dengan merasuknya gerakan gender pada wilayah dan kesadaran partisipatif yang lebih luas, yakni Negara *(State building)* yang bersentuhan dengan kebijakan-kebijakan publik yang memiliki konsekuensi pada relasi gender.

Perhatian publik terhadap isu-isu gender mutakhir di Indonesia menjadi tanda akan meningkatnya gerakan ini. Sebut saja beberapa contoh: dimulai dari momentum gerakan pengaturan kuota anggota parlemen bagi perempuan, beberapa aksi berskala massif dari ormas berbasis agama (FPI, MUI) yang ditandingi oleh Aliansi Bhinneka Tunggal Ika dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) seiring sejalan kontroversi seputar sosialisasi dan pemberlakuan Undang-Undang Pornografi (sebelumnya dirumuskan sebagai RUU Anti Pornografi dan

[15] Gender merupakan tata nilai identitas yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural dengan identitas nilai dan norma yang melekat pada domain laki-perempuan. Pada alurnya kemudian muncul "seksualitas" di mana seksualitas sebagai proses sosial dengan relasi-relasi sosial dari gender diciptakan, diorganisir, diekspresikan, dan diarahkan, membentuk makhluk sosial yang dikenal dengan perempuan dan laki-laki. Relasi-relasi di antara mereka tersebut yang akhirnya membentuk masyarakat Baca : Catherine A. MacKinnon, *Toward A Feminist Theory of The State*, (London: Harvard University Press, 1989), hlm. 3.

Pornoaksi) periode 2006 - 2008, kontroversi soal fatwa MUI mengenai sunat perempuan (Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 tertanggal 7 Mei 2008) dan kontroversi seputar budaya poligami dan kawin cerai hingga yang paling terakhir adalah polemik seputar pengajuan judicial review soal UU pekawinan beda agama di Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa contoh tersebut manandai bahwa gerakan gender telah memasuki babak baru dalam pencarian, kontestasi, penentuan dan pengakuan identitas sosial dan budaya politik di Indonesia dalam ruang publik Negara.

Fenomena gerakan yang makin meluas tersebut tak terjadi secara otomatis, melainkan melalui segenap rentang gerakan yang panjang. Dalam konteks Indonesia, gerakan feminisme yang dikenal juga sebagai gerakan gender telah terdengar sejak awal tahun 60-an dan menjadi isu dalam kaitannya dengan pembangunan pada tahun 70-an.

Mansour Fakih memerinci tahapan gerakan feminisme ini pada tiga dasawarsa yang saling bersambung. Pada dasawarsa pertama, sekitar 1975-1985, permasalahan gender belum sepenuhnya dianggap sebagai masalah penting oleh Lembaga Swadaya masyarakat (LSM). Pada masa itu, belum terlihat isu keperempuanan begitu dianalisisis dengan perspektif gender secara memadai, sehinggna reaksi terhadap masalah ini sering menimbulkan konflik antar aktivis perempuan dan lainnya. Pada dasawarsa selanjutnya, sekitar 1985-1995, dinamakan dengan tahap pengenalan dan pemahaman dasar tentang apa yang dimaksud dengan analisis gender dan mengapa gender menjadi masalah pembangunan.

Pada tahap selanjutnya, dari 1995-hingga sekarang, gerakan feminisme telah menjadi gerakan yang kuat dengan basis dan strategi yang matang. Dimana ia telah diarahkan untuk menuju pengintegrasian gender ke dalam seluruh kebijakan dan program berbagai organisasi dan lembaga pendidikan.[16] Analisis di atas sangat terlihat dengan kemunculan LSM-LSM perempuan pada dasawarsa terakhir dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Berbagai LSM memfokuskan diri pada isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan melihatnya dari sisi yang berlainan, bahkan terkadang antar satu LSM dengan LSM lainnya terdapat pertentangan yang mendasar.

Pengaruh gerakan feminisme di Indonesia juga telah melahirkan berbagai pusat-pusat studi wanita di berbagai lembaga pendidikan dan institusi sebagai bagian integral dan institusi tersebut. Dari lembaga-lembaga-lembaga pengkajian ini, lahir berbagai macam buku panduan yang ditulis berdasarkan riset dan penelitian terhadap fenomena yang terkait dengan perempuan. Kendati gerakan feminisme di lembaga-lembaga kajian

[16] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, Cet. VII, hlm. 160-163.

tingkat akademis ini terkesan elitis, namun ia cukup berpengaruh terhadap gerakan feminisme secara luas. Demikian juga pada setiap organisasi kemasyarakatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kendati ia bukan *pure* feminisme, namun pengaruhnya terhadap perubahan paradigma dan budaya tidak bisa diabaikan.

Dampaknya di tingkatan politik, gerakan feminisme telah menduduki posisi yang tidak bisa diabaikan. Ia telah berhasil menelurkan berbagai kebijakan-kebijakan publik yang pengaruhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Di tingkatan politik, analisis gender telah menelurkan berbagai undang-undang yang secara khusus ditujukan untuk perbaikan nasib perempuan di Indonesia. Undang-undang dibuat dengan asumsi bahwa selama ini telah terjadi banyak diskriminasi terhadap perempuan dan sudah saaatnya keadilan perempuan diperjuangkan dan diraih. Pada era seperti sekarang ini, analisis gender menjadi mata analisis wajib pada setiap persoalan. Dalam dunia pendidikan, analisis gender telah banyak digunakan, untuk menganalisis segala bentuk diskriminasi.

Meski demikian, gerakan feminisme yang berkembang dinamis di Indonesia bukanlah absen dari kritik. Terdapat beberapa catatan penting yang harus segera dipikirkan dalam upaya memperkuat gerakan gender, terlebih memasuki era multikulturalisme. Kajian-kajian kritis terhadap fenomena gender gender juga menjadi tanda akan tuntutan-tunturan era baru gerakan gender. Tuntutan-tuntutan tersebut merupakan respon atas berkembangnya cara pandang baru, seperti halnya era multikulturalisme.

Di antara kritik yang muncul semisal bahwa gerakan feminisme dengan paradigma yang mengagung-agungkan kebebasan perempuan dinilai telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap pergeseran budaya di Indonesia. Banyak perempuan yang merasa bebas dan merdeka dengan segala tindakan yang dipilihnya, kendati itu bertentangan dengan adat dan norma yang berlaku di Indonesia seperti yang terjadi misalnya dalam semisal kontroversi RUU Pornografi dan Pornoaksi. Bahkan isu ini merambah pada isu pemisahan wilayah oleh beberapa kalangan di Indonesia. Tentu saja hal ini menjadi bahaya tersendiri bagi masa depan multikulturalisme di Indonesia.

Pengadopsian paham feminisme tanpa alienasi juga dinilai telah menjadikan sebagian perempuan Indonesia “memusuhi” laki-laki. Nah, jika fenomena seperti ini riil terjadi, maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip multikulturalisme. Feminism liberal memang seakan menjadikan budaya patriarki menjadi musuh utama. sehingga tugas utama para feminis ini adalah penghancuran budaya patriarki itu sendiri. Dengan dalih keadilan dan kesetaraan gender, paham ini bisa merubah tatanan yang mapan dipakai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Praksisnya barangkali, tidak tanggung-tanggung, pilihan melajang sengaja dipilih karena menganggap

bahwa institusi keluarga telah menjadikan perempuan terdiskriminasi. Dan kampanye untuk meninggalkan institusi keluarga ini telah dan sedang digencarkan oleh sebagian feminis. Bisa dibayangkan, bila kondisi seperti ini dibiarkan tanpa kontrol yang memadai, keadaan Indonesia tidak akan jauh berbeda dengan Negara-negara Barat, tempat di mana feminisme muncul.

Disinilah kemudian, model gerakan feminisme mulai muncul kritik untuk konteks Indonesia. Pengadopsian pola gerakan tanpa seleksi ini tentunya bukan tanpa resiko dan konsekuensi. Karena bagi Indonesia yang memiliki karakteristik dan ciri khas yang membedakannya dengan negara lain harus siap membayar mahal bila paham feminisme dengan pandangan hidupnya dicatut tanpa disesuaikan dengan budaya dan latar belakang bangsa Indonesia. Indonesia adalah Negara beragama dan berbudaya. Oleh karenanya, dalam pengadopsian suatu paham, hendaknya disesuaikan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia agar tidak berbenturan dengan jati diri bangsa Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya patriarki memang telah menimbulkan beberapa permasalahan terhadap perempuan. Namun untuk menghadapinya, pemakaian teori-teori femnisme secara penuh bukanlah jalan keluarnya. Menghindari institusi keluarga dan menghancurkannya tentu bukan hal bijak dipakai sebuah solusi untuk menghancurkan budaya patriarki. Beberapa teori feminisme yang disambung oleh para aktivis perempuan juga bukan tanpa masalah. Di satu sisi mereka memberikan solusi, namun solusi itu ternyata menjadi permasalahan baru. Maka kritik terhadap gerakan feminisme ini akan selalu muncul, baik dari luar feminis maupun dari dalam tubuh feminis itu sendiri. Bahkan terdapat kritik bahwa lahirnya teori ekofeminisme dan feminisme global adalah respon sekaligus evaluasi terhadap feminisme yang marak di dunia. Karena juga telah menjadi masalah baru dalam dunia feminisme, karena kecenderungan mereka untuk mendominasi.[17]

D. Konstruksi Paradigmatik *Gender Mainstreaming* di Indonesia

Paparan diatas memberikan indikasi bahwa saat ini diperlukan sebuah paradigma baru dalam gerakan gender dalam bingkai multikulturalisme. Hemat penulis, dalam konteks Indonesia, diperlukan sebuah arah gerakan feminisme berbasis multikulturalisme. Sebuah model gerakan yang menekankan analisis lokal yang kontekstual menjadi dasar analisis gerakan feminisme. Model feminis Barat yang menganggap perempuan sebagai kelompok koheren yang sudah terbentuk dan dipandang sebagai suatu yang homogen oleh kacamata Barat telah menjadi arah yang

[17] Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda*, Bandung: Mizan, 1998.

kurang efektif. Senada dengan hal ini, Budiman pernah menyebut bahwa feminisme multikultural lebih menekankan perbedaan kondisi-kondisi perempuan yang menyebabkan penindasan terhadap perempuan juga berbeda.[18]

Untuk konteks Indonesia, feminisme multikultural ini lebih cocok dengan keragaman budaya yang dimilikinya. Karena tentunya kurang bijak bila menjadikan kacamata Barat untuk memandang permasalahan perempuan di Indonesia yang khas dengan pandangan hidupnya. Dibutuhkan paradigma yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Paradigma gerakan gender multikultur ini juga bisa disebut sebagai paradigma *inklusif*. Paradigma Inklusif menekankan bahwa relasi gender bukanlah model konflik yang berasumsi bahwa pola relasi sosial selalu berdasarkan konflik penguasa (laki-laki) dan subordinate (perempuan). Ia lebih cenderung mengartikan bahwa relasi yang ada antara laki-laki dan perempuan adalah fungsional.[19]

Untuk itu, diperlukan sebuah konstruksi paradigmatik baru dalam membangun gerakan gender di ruang public dalam konteks Indonesia yang multikultur. *Pertama,* diperlukan penguatan pengakuan hak menentukan diri sendiri *(self determination)* dan pengakuan politik *(political regocnition). Self determination* adalah bahwa dalam struktur murtikulturalisme, sebuah Paham kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, Gender, bahasa, ataupun agama merupakan sebuah keniscayaan. Demikian juga *political recognition* sebagai ruang pemberian hak dan pengakuan politik identitas atau kebijakan publik yang dibuat dan diatur mesti terbuka lebar. Ruang untuk

---

[18] Manneke Budiman, Feminisme Multikultural: Refleksi sekaligus Proyeksi dalam *Perempuan Multikultural*, Jakarta: Desantara, 2005, hlm. 75-87.

[19] pradigma ini selaras dengan pandangan sufisme Islam, yaitu nama-nama keindahan dan keagungan Tuhan. Dalam konsep Taoismemisalnya, disimbolkan dengan *yin* dan *yang*. Simbol ini menggambarkan kesatuan antara *yin* (kualitas feminine) dan *yang* (kualitas maskulin). Kesatuan ini tidak menjadikan keduanya hilang identitasnya, di mana masing-masing tetap mempunyai ciri khasnya, yaitu hitam (*yang)* dan putih *(yin)*. Bagian lekukan ke dalam sisi hitam akan diisi oleh bagian sisi putih, dan begitu sebaliknya. Laki-laki dan perempuan berbeda untuk menjalankan misinya masing-masing, tetapi untuk saling merengkuh mencapai satu tujuan, yaitu kelangsungan kehidupan dan peradaban manusia itu sendiri. Baca : Sachiko Murata, *The Tao of Islam (terj)*, Bandung: Mizan, 2004, cet. XI, hal. 86. Dalam bahasa Ratna Megawangi, paradigm ini diilustrasikan Ketika laki-laki mempunyai sifat kasih sayang, dan perempuan memiliki sifat pemimpin, ia adalah wujud dari warna-warna yang masing dimilikinya, namun ia bukalah dominan. Ketika perempuan telah sukses pada pekerjaannya, karena situasi, kondisi, umur misalnya harus menjalankan peran keibuannya dan menjadi tergantung pada suaminya, maka ia akan menjalankannya tanpa harus mengalami konflik batin dan merasa tersubordinasi. Baca : Ratna Megawangi, *op.cit,* hlm. 219.

menyuarakan keinginan mereka haruslah terbuka lebar untuk bisa terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan publik (Negara) seperti kebijakan sosial dan sebagainya.

Kedua, Gerakan gender berbasis multikulturalisme mesti menggunakan pendekatan *Bottom up.* Pendekatan dari bawah ke atas ini merupakan kesatuan yang utuh dengan yang pertama untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan minoritas yang diperjuangkan lewat pengakuan kebijakan politik tidak menyebabkan dominasi baru di internal kelompoknya. Hal ini sekaligus sebagai antisipasi yang sudah disampaikan diatas, bahwa ditengah gerakan feminism justru terkadang menyebabkan di internal kelompok perempuan mempraktikkan dominasi baru 'tanpa laki-laki pun bisa'. Demikian juga semisal dalam regulasi-regulasi yang telah diatur resmi oleh negara harus bisa secara detail memastikan bahwa telah menyentuh tidak berlangsungnya dominasi laki-laki atas perempuan di dalam sub kelompoknya, semisal tentang peraturan tentang adat dan hak ulayat.

Sebab masih banyak dijumpai, bahwa regulasi yang dimaksudkan untuk melindungi hak semisal masyarakat Adat, *tidak serta-merta* menjamin adanya kesetaraan dan keadilan jender bagi perempuan yang tinggal *di dalam* masyarakat adat tersebut. Fakta-fakta sosial seperti juga masih banyak bisa dijumpai dalam budaya-budaya masyarakat Indonesia, semisal dalam budaya perkawinan. Misalnya, tradisi mahar yang dikenal dengan sebutan "Jujuran" pada komunitas etnis di Kalimantan Timur sebagai bentuk pemberian penghargaan tinggi bagi kaum perempuan, apakah terjamin tidak menjadi komoditi ekonomis keluarga yang lebih dominatif. Sebab, kasus yang sama juga banyak terjadi pada komunitas lain seperti di NTT, dimana perempuan dihargai mahal justru setelah pernikahan banyak di telantarkan, karena pemahaman 'telah terbeli'.

Ketiga, Bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara dalam melangsungkan gender berbasis multikulturalisme harus melihat apakah kebijakan itu sudah mencerminkan kepentingan dari anggota atau bagian dari kelompok itu yang kurang mempunyai kuasa dan suara. Artinya, *di dalam* lingkup kelompok budaya itu sendiri pun harus bisa mengakomodasi kepentingan dan suara kaum perempuan muda (karena kaum perempuan yang sudah tua cenderung di-kooptasi oleh pemimpin atau tetua kelompok, yang biasanya laki-laki, untuk melanggengkan struktur penindasan dan ketidaksetar aan dalam kelompok itu) dalam menegosiasikan hak-hak kelompok yang diajukan dan diminta untuk diakui secara publik – legal.

Hal ini pernah singgung dalam kajian dalam Esai dari Susan Moller Okin (1999)[20] berjudul "Is Multiculturalism Bad for Women?" yang mencoba menempatkan perspektif multikulturalisme dalam kerangka kritik feminis. Bagi Okin, salah satu implikasi penerapan kebijakan multikulturalis dalam sebuah negara, dengan memberikan hak-hak istimewa kepada kelompok kelompok budaya minoritas (*group rights*) bisa memunculkan bahaya baru yaitu pelanggengan struktur dan sistem budaya patriarkal yang menindas perempuan dalam kultur tersebut.

Lebih lanjut menurut Okin, Hal ini disebabkan 2 hal. Pertama, para pendukung hak-hak kelompok untuk minoritas cenderung memandang kelompok-kelompok budaya secara tunggal. Mereka cenderung memberikan perhatian lebih pada perbedaan *di antara* kelompok-kelompok budaya yang satu dengan lainnya daripada perbedaan-perbedaan *di dalam* sebuah kelompok minoritas budaya/etnis. Kedua, para pendukung kebijakan hak hak kelompok minoritas juga cenderung mengabaikan fakta yang terjadi di ranah privat (rumah tangga).

Dari sini bisa dipahami bahwa setidaknya terdapat Ada 2 model solusi, yakni teoretis – wacana dan politis – praktis. Dalam hal wacana, bahwa pemberian hak-hak cultural pada kelompok minoritas perlu lebih mencermati *ketidakadilan yang terjadi di dalam* kelompok-kelompok minoritas yang mereka bela itu. Ketidakadilan itu, secara lebih spesifik lagi, harus dilihat dalam relasi ketidakadilan di antara jenis kelamin yang berbeda (*inequalities between the sexes*) karena sifatnya yang tidak publik, dan karenanya lebih sulit dikenali (lebih sering tersamar). Sementara dalam hal politik dan kebijakan, agar kebijakan yang diambil oleh negara harus melihat cerminan kepentingan dari kelompok yang kurang mempunyai kuasa dan suara. Sementara *di dalam* lingkup kelompok budaya itu sendiri

[20] Susan Moller Okin (19 Juli 1946 – 3 Maret 2004) adalah seorang filsuf politik dan juga seorang feminis yang cukup rajin menulis buku, esai, dan artikel seputar isu perempuan dan kesetaraan jender. Pada 1990, Okin menjabat Profesor Etika dalam Masyarakat di Stanford University (USA). Karir akademisnya dimulai pada 1979, lewat publikasi buku pertamanya, *Women in Western Political Thought*. Dalam buku ini, Okin menggambarkan secara mendetil sejarah persepsi tentang perempuan dalam ilsafat politik Barat. Pada 1989, Okin memublikasikan bukunya yang kedua, *Justice, Gender, and the Family*. Dalam buku dimuat kritik Okin terhadap teori keadilan modern yang dikembangkan para ilsuf laki-laki seperti John Rawls, Robert Nozick, dan Michael Walzer. Menurut Okin, para ilsuf laki-laki ini menuliskan teori-teori mereka dari perspektif laki-laki yang mengasumsikan secara keliru bahwa pelembagaan keluarga adalah sesuatu yang adil. Okin berargumen bahwa keluarga melanggengkan ketidaksetaraan jender ke seluruh lapisan masyarakat, terutama karena anak-anak dididik dan dibesarkan dalam *seting* keluarga sehingga ketika mereka sudah besar, ide-ide dan kerangka nilai yang mereka jadikan acuan dalam berperilaku dan berpikir menyimpan bias patriarkal. Jika teori keadilan yang utuh-komplet mau dicapai, teori itu harus memeriksa ketidaksetaraan jender yang sudah mengurat-akar di dalam keluarga-keluarga modern.

pun harus bisa mengakomodasi kepentingan dan suara kaum perempuan muda dalam menegosiasikan hak-hak kelompok yang diajukan dan diminta untuk diakui secara publik – legal.

E. Memperkuat *Gender Mainstreaming* di Ruang Publik

Meski diyakini bahwa sampai sejauh ini masih terjadi pemahaman dan praktik bias gender, namun gerakan gender semakin menemukan momentumnya dengan dialektika multikulturalisme. Multikulturalisme telah memberikan ruang yang semakin terbuka bahwa gerakan gender saat ini perlu diperkuat melalui kearah sektor-sektor publik kebijakan dan politik Negara. Gender dalam bingkai multikulturalisme yang menawarkan paradigma kebudayaan untuk mengerti perbedaan-perbedaan yang selama ini ada di tengah-tengah masyarakat menemukan ruang gerakan yang lebih kuat.

Dalam istilah yang lebih luas, upaya memperkuat gerakan gender ke dalam ruang publik kebijakan dan politik negara ini dikenal dengan istilah Pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*). *Gender mainstreming* adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan dan penerapan kebijakan yang berperspektif gender pada organisasi dan institusi. Pengarusutamaan gender merupakan strategi alternatif bagi usaha pencepatan tercapainya kesetaraan gender karena nuansa kepekaan gender menjadi salah satu landasan dalam penyusunan dan perumusan strategi, struktur, dan sistem dari suatu organisasi atau institusi, serta menjadi bagian dari nafas budaya di dalamnya. Strategi ini merupakan strategi integrasi kesamaan gender secara sistemik ke dalam seluruh sistem dan struktur, termasuk kebijakan, program, proses dan proyek, budaya, organisasi.

Selain diperlukannya paradigma-paradigma baru gender dalam perspektif multikulturalisme di atas, pada level implementasi, diperlukan strategi-strategi yang bisa diterapkan dalam mencapai capaian yang diinginkan, baik secara internal maupun eksternal.

Strategi internal yang dimaksud adalah bahwa dalam rangka memperkuat gerakan gender perlu langkah-langkah ke dalam, yakni bagi komunitas gerakan gender seperti bagi LSM-LSM, aktifis peremuan, lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya. Secara internal, menegoisasikan gerakan gender dalam era multikulturalisme meniscayakan beberapa strategi baik dalam arti mengkampanyekan dan mewacanakan gerakan gender maupun memperjuangkan dan merekonstruksikannya menjadi kebijakan publik melalui politik Negara.

Pertama, membangun kesadaran egalitarianisme kultural berbasis gender. Kesadaran egalitarianisme menjadi kunci utama bagi upaya

memperkuat gerakan gender di tengah multikulturalisme. Egalitarianisme meniscayakan kesadaran bahwa pola kesejajaran relasi antara laki-laki dan perempuan. Di mana realitas perbedaan gender tidak lagi dipandang sebagai suatu bentuk dikhotomik yang mendiametralkan posisi antara subjek-objek; superior-inerior atau publik-domestik, tetapi perbedaan tersebut dipandang sebagai bentuk pluralitas yang masing-masing memiliki nilai keunggulan dan kelemahan, sehingga terbangun saling "memerlukan" dan "mengisi" kekurangan serta saling "menghargai" kelebihan masing-masing.[21]

kesadaran ini mampu membawa pada pola-pola relasi kooperatif (kerjasama) yang tidak hanya dalam lingkup domestik *an sich* seperti dalam rumah tangga, akan tetapi juga dalam lingkup yang lebih luas (publik) seperti dalam lingkup masyarakat atau negara. Charles Horton Cooley memberikan gambaran bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama.[22]

Meskipun multikulturalisme sebagai paham yang lebih memperjuangkan minoritas dalam kelompok yang lebih besar, baik *wacana* maupun sebagai *agenda praktis perjuangan politik*, tidak perlu diperlawankan dengan agenda feminis yang berupaya untuk memajukan kesetaran dan keadilan jender. Meski masih terdapat ketegangan konseptual dan praktis antara kedua isu besar ini, namun ada satu hal yang dilihat penulis bisa menjadi kerangka kerja bersama baik bagi kaum multikulturalis maupun bagi kaum feminis, yaitu: *kesadaran membangun egalitarianism* akan keanekaragaman budaya, bangsa, kepentingan dan suara sekaligus *pengakuan* bahwa *keanekaragaman* itu bisa menyumbang pemahaman akan realitas dan menjadi *titik pijak* di ruang public untuk menolak model model homogenisasi dan eksploitasi baik oleh aparat negara, budaya patriarkal dan pemilik kuasa dominative lainnya.

Dengan kesadaran tersebut, diharapkan mampu menciptakan dan membangun perilaku-perilaku egaliter terhadap budaya dan atribut yang lain. Pandangan yang demikian memberikan implikasi pada tumbuh kembangnya pola pikir adanya kesetaraan budaya, sehingga antara satu entitas budaya dengan budaya lainnya tidaklah berada di dalam suasana

[21] Baca : QS. al-Baqarah: 187.

[22] Charles Horton Cooley, *Sociological Theory and Social Research*, (New York: Henry Holt and Company, 1999), hlm. 176.

bertanding untuk memenangkan pertarungan.[23]

Kedua, memperluas solidaritas bersama di antara kaum perempuan yang berbeda-beda yang memberi tekanan serta bobot pada 'perbedaan' dan 'keanekaragaman pengalaman' sebagai titik berangkat perjuangan. Momentum massif isu UU Anti pornografi dan Pornoaksi (UU APP) serta isu Poligami yang telah menyedot perhatian banyak pihak dan memunculkan banyak aliansi-aliansi masyarakat misalnya, bisa dilihat sebagai contoh starategi politis untuk menanggapi isu kontroversial yang potensial memecah-belah persatuan bangsa. Pembentukan Aliansi semacam ini perlu diapresiasi dan bisa dijadikan model "membangun gerakan solidaritas bersama" di atas kekayaan perbedaan dan keanekaragaman pengalaman. Ketertindasan dan ketidakadilan menjadi kunci utama yang mengikat aliansi-aliansi semacam ini, di hadapan musuh besar bersama, yaitu (1) negara dengan paradigm mengatur dan menyeragamkan perbedaan untuk menjamin (secara semu) stabilitas nasional dan (2) radikalisasi agama, yang mengatasnamakan suara mayoritas untuk membungkam suara-suara kecil *subaltern* yang jamak dalam hal penafsiran kitab, sekaligus politisasi agama (membawa simbol- simbol agama dan menyerukan klaimklaim kemutlakan untuk melanggengkan *status quo* kekuasaan) dalam ruang publik modern. Memperbanyak agen dan aktivis gender dan kaum multikultur menjadi kunci strategi ini.

Ketiga, membangun model *organis-fungsional*. Artinya, gerakan gender di era multikulturalisme perlu membangun mekanisme organis untuk secara fungsional memperjuangkan, mendesain dan mengelola gerakan gender sampai level publik melalui kebijakan-kebijakan Negara. individu dan kelompok gerakan gender berfungsi mengupayakan penafsiran baru terhadap identitas kebudayaan yang melukai hak-hak asasi anggotanya, sementara negara harus menyelesaikan fungsi distributifnya untuk memberikan ruang penafsiran terhadap identitas tersebut. Jika kedua fungsi ini berjalan dengan baik, muncullah *dual track* yang memungkinkan terciptanya ruang dialog sebagai prinsip demokrasi antara kelompok dan individu. Strategi ini juga dikenal dengan istilah *transformative accomodation by join government*. Penafsiran ulang terhadap status perempuan harus dimulai dari transformasi kelompok kultural di mana mereka hidup. Untuk mencapai transformasi ini, negara juga perlu ambil bagian melalui kebijakan-kebijakannya yang tidak diskriminatif terhadap perempuan.

Terkait strategi ini, juga patut dicatat bahwa bahwa strategi memperkuat gerakan gender adalah tak harus selalu konfrontatif.

[23] Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 79.

Perjuangan memperkuat gender bisa dengan strategi secara negoisatif, bertahap dan berlapis. Hal ini untuk menghindari bangkitnya kekuatan-kekuatan yang selalu berhadap-hadapan semisal sekuler-religius, sayap kanan-kiri, liberal fundamental. Jika hal ini terjadi, maka tak akan strategis di era multikulturalisme. Bukankah identititas perempuan tidak tunggal dan bangkitnya fundamentalisme, popularitas poligami yang mendapat dukungan sipil perempuan juga akibat dari situasi seperti ini, yakni selalu mengganggap fenomena perempuan sebagai identitas tunggal.

Sedangkan strategi eksternal menurut hemat penulis, Dalam konteks era multikulturalisme, *gender mainstreaming* harus diperluas fungsinya bukan saja strategi memperkuat gerakan melalui kebijakan-kebijakan institusi atau organisasi gender itu sendiri, malainkan mesti meluas dalam sektor Negara melalui pengaturan-pengaturan perundang-undangan yang mengikat kesatuan kultur-kultur yang berbeda.

Gender mainstreaming dalam struktur Negara meniscayakan beberapa hal, yakni akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. 1) Akses. Wujud kesetaraan dan keadilan gender dalam Negara harus bisa memastikan pemberian kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki sebagai sumber daya yang diakui; 2) Partisipasi. Negara memberikan ruang kepada perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan; 3) Kontrol: perempuan dan laki-laki mempunyai kekuasaan yang sama sebagai sumber daya Negara; dan 4) Manfaat, dimaksudkan bahwa pembangunan Negara harus mempunyai manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Al hasil, keempat hal ini memiliki kata kunci *gender equality* dan *gender equity.*

Gender equality (kesetaraan gender) adalah sebuah kondisi yang dapat menjamin bahwa kesempatan dapat diperoleh semua orang baik perempuan dan laki-laki. Setiap perempuan dan laki-laki dapat mengaktualisasikan potensi dan hak mereka sebagai manusia, sehingga dapat berpartisipasi dan berkontribusi di semua bidang kehidupan manusia dan memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil yang diperoleh dari dan oleh negara. Namun juga diperlukan keadilan gender, yakni sebuah proses dimana perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan yang sama tetapi tetap *fair* bagi keduanya disesuaikan dengan kondisi kodrati mereka *(gender equity).*

F. Penutup

Kajian gender *(gender studies)* telah mengalami penguatan posisi seiring datangnya era multikulturalisme. Gerakan gender saat ini bukan lagi terbatas pada wacana diskursus, tetapi telah merambah hingga level gerakan

sektor publik melalui kebijakan dan bangunan politik Negara. Gerakan gender di era multikulturalisme memerlukan pendekatan studi yang lebih kritis sebab feminisme yang selama ini menjadi penopang gerakannya mengalami banyak polemik dan kritik seiring anggapannya yang menempatkan perempuan sebagai identitas tunggal. Pada saat yang sama, justru menciptakan dominasi dan hegemoni baru serta konflik sosial di internal identitas kebudayaannya serta tidak menjamin kesetaraan yang sedang diperjuangkan. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam memperjuangkan gerakan di tengah budaya multikulturalisme untuk mendapatkan nilai-nilai *equality* dan *equity* dalam praktik kehidupan diruang publik. *Wallahu A'lam bi al Shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

Alvesson, Mats & Billing, Yvonne Due, *Understanding Gender and Organizations*, (London: Sage Publications, 2009).

Amstrong, Karen, *The Great Transformation: The World in the Time of Buddha, Socrates, Confucius and Jeremiah*, (London: Atlantic Books, 2006).

Anderson, Pemela Sue, *A Feminist Philosophy of Religion,* (New York: Blackwell Publisher, 1998).

Bahtiar, Riza, "Problem Tanah dan Identitas Komunitas Adat Dayak Pitap" dalam Hikmat Budiman (editor), (2005). *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, Jakarta: The Interseksi Foundation,

Beasley, Chris, *Gender & Sexuality: Critical Theories, Critical Thinkers*, (London: Sage Publications, 2005).

Budiman, Manneke, Feminisme Multikultural: Refleksi sekaligus Proyeksi dalam *Perempuan Multikultural*, (Jakarta: Desantara, 2005).

Chambers, Clane, *Sex, Culture, and Justice: The Limits of Choice*, (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2008).

Chanter, Tina, *Gender: Key Concepts in Philosophy*, (London: Continuum International Publishing Group, 2006).

Cooley, Charles Horton, *Sociological Theory and Social Research*, (New York: Henry Holt and Company, 1999).

Ember, Carol R. & Ember, Melvin (Edit.), *Encyclopedia of Sex and Gender*, London: Plenum Publishers, 2003).

Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Peterj.: Agus Nuryatno, (Yogyakarta: LKiS, 2003).

----------, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (terj.) Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA, 2000).

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, Cet. VII).

Gunawan, FX Rudy, *Refleksi atas Kelamin: Potret Seksualitas Manusia Modern*, (Magelang: Indonesia Tera, 2000).

Haque, Ziaul, *Revelation and Revolution in Islam,* (New Delhi: International Islamic Publishers, 1992)

Hasibuan, Muhammad Umar Syadat, *Revolusi Politik Kaum Muda*, (Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Holmes, Mary, *What Is Gender?: Sociological Approaches*, (London: Sage Publications, 2007).

Jasmani, *Pendidikan Islam Egaliter: Membangun Pendidikan Feminim atas Superioritas Maskulinitas*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2011).

Kusnadi, dkk., *Perempuan Pesisir*, (Yogyakarta: LKiS, 2006).

Lash, Andre A Scott & Featherstone, Mike (ed.), Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture (London: Sage Publication, 2002).

Lentin, Alana & Titley, Gavan, *The Crises of Multiculturalism: Racism in Neoliberal Age*, (London: Zed Books, 2011).

Liliweli, Alo, *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LKiS, 2005).

Lippa, Richard A., *Gender, Nature, and Nurture*, (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2002).

Maccoby, Eleanor E. & Jacklin, Carol N., *The Psychology of Sex Differences*, (Stanford: Stanford University Press, 1978).

MacKinnon, Catherine A., *Toward A Feminist Theory of The State*, (London: Harvard University Press, 1989).

Marhumah, *Konstruksi Gender, Hegemoni Kekuasaan, dan Lembaga Pendidikan*, dalam KARSA, Vol. 19 No. 2 Tahun 2011.

Martono dkk, *Hidup berbangsa dan Etika Multikultural* (Surabaya : Forum Rektor Simpul, 2003).

Matsumoto, David & Juang, Linda, *Culture and Psychology*, (Belmont: Wadsworth, 2013).

Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda,* Bandung: Mizan, 1998.

Munro, Surya, *Gender Politics: Citizenship, Activism and Sexual Diversity*, (London: Pluto Press, 2005).

Murata, Sachiko, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, Peterj.: Rahmani Astuti & M. Nasrullah, (Bandung: Mizan, 2000).

Pilcher, Jane & Whelehan, Imelda, *50 Key Concepts in Gender Studies*, (London: Sage Publications, 2004).

Rachman, Budhy Munawar, *Islam dan Liberalisme*, (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2011).

Sterling, Anne Fausto, *Sex/Gender: Biology in a Social World*, (London: Routledge, 2012).

Syam, Nur, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009).

Tilaar, H. A. R., *Multikulturalisme : Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta : Grasindo, 2004).

Ujan, Andre Ata dkk, *Multikulturalisme : Belajar Hidup Bersama dalam perbedaa*n (Jakarta : PT indeks, 2009).

Walby, Sylvia, *Gender Transformations*, (London: Routledge, 2005).

Watson, C. W. *.M ulticulturalism.* (Buckingham-Philadelphia: Open University Press, 2000).